

**DAMPAK KRISIS EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1946—1950
TERHADAP LAHIRNYA KEBIJAKAN GUNTING UANG OLEH
SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA**

SKRIPSI

**OLEH
DESTI ANDRIANI
NIM. 352016014**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
AGUSTUS 2020**

**DAMPAK KRISIS EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1946—1950
TERHADAP LAHIRNYA KEBIJAKAN GUNTING UANG OLEH
SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan**

**Oleh
Desti Andriani
NIM. 352016014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
Agustus 2020**

Skripsi oleh Desti Andriani ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Palembang, 29 Agustus 2020
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dra. Nurhayati'.

Dra. Nurhayati, M.Pd.

**Palembang, 29 Agustus 2020
Pembimbing II,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuliarni'.

Yuliarni., S.Pd., M.Hum.

**Skripsi oleh Desti Andriani ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 29 Agustus 2020**

Dewan Penguji :



Dra. Nurhayati, M.Pd., Ketua



Yuliarni, S.Pd., M.Hum., Anggota



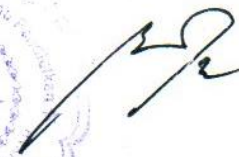
Dra. Fatmah, M.Hum., Anggota

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,**



Heriyati, S.Pd., M.Hum.

**Mengetahui,
Dekan
FKIP UMP,**



Drs. H. Rusdy AS., M.Pd.

➤ **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

MOTTO:

- 📖 *Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar (Q.S Al-Baqarah : 153).*
- 📖 *Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat. (Iman Syafi'i).*
- 📖 *Setiap kamu merasa beruntung, percayalah do'a ibumu telah didengar.*

Kupersembahkan kepada:

- 📖 *Kedua orang tuaku yang sangat kuhormati dan kusayangi, ayahanda Judion dan Ibunda Sunarsih yang selalu memberikan do'a dan nasehat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segalanya.*
- 📖 *Kakak dan adikku tercinta, Teguh Wahyudi dan Riko Damara.*
- 📖 *Dosen pembimbing Dra. Nurhayati M.Pd., dan Yuliarni S.Pd., M.Hum. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya.*
- 📖 *Sahabatku tersayang (Fitri Yulianti, Sinta Dwi Saputri, Ismatul Khoiriyah, Rini Melinda, Kiki Rina Karlina, Winda Alma Sonia Putri, dan Wiwik Sri Rahayu).*
- 📖 *Rekan-rekan seperjuangan di waktu bimbingan (Risa Budi Utami, Kartika, Ira Permatasari Rosadi dan Muhammad Chesar Woring) yang selalu memberikan masukan dan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.*
- 📖 *Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2016 yang selalu memberi motivasi dan dukungan.*
- 📖 *Teman-teman PPL SMA Negeri Unggul 4 Palembang.*
- 📖 *Teman-teman KKN Posko 222 Angkatan 53 (Lindriani, Mentari Alisha, Yuniar Nabilla, Nopri Wahyuni, Azis Azmi Suganda, M. Ridho Hasan, Al Fitrah, Anjas, Dimas, Irfansyah, dan Ari Saputra).*
- 📖 *Agamaku dan Almamaterku.*

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desti Andriani
NIM : 352016014
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Judul Karya Ilmiah/Skripsi : Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950
Terhadap Lahirnya Kebijakan Gunting Uang oleh Syafruddin
Prawiranegara

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul tersebut di atas adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Palembang,
Yang menerangkan,
Mahasiswa yang bersangkutan



Desti Andriani
Nim.352016014

ABSTRAK

Andriani, Desti. 2020. *Dampak Krisis Ekonomi Di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan Gunting Uang Oleh Syafruddin Prawiranegara*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Sarjana (S1). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang. Dosen Pembimbing: (1) Dra. Nurhayati M.Pd (2) Yuliarni, S.Pd., M.Hum.

Kata Kunci: Krisis, Ekonomi, Kebijakan Gunting Uang, Syafruddin Prawiranegara.

Penelitian ini **dilatarbelakangi** oleh keingintahuan penulis tentang dampak krisis ekonomi di Indonesia tahun 1946-1950 terhadap lahirnya kebijakan gunting uang oleh Syafruddin Prawiranegara. **Rumusan Masalah** penelitian ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan gunting uang Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950; (2) Bagaimana proses pelaksanaan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950; (3) Bagaimana reaksi rakyat Indonesia dengan adanya kebijakan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Di Indonesia tahun 1950; (4) Apa dampak kebijakan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950 bagi perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan adalah *metode penelitian sejarah* dengan jenis penelitian adalah *kajian pustaka*. **Kesimpulan** dalam penelitian ini adalah: (1) Latar belakang munculnya kebijakan gunting uang oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara tahun 1950 ialah banyaknya jumlah uang Jepang yang beredar menyebabkan *inflansi*, kedatangan pasukan tentara NICA/Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia, Belanda melakukan *blockade* ekonomi, mata uang NICA dan Oeang Republik Indonesia yang beredar semakin tidak terkendali; (2) Proses pelaksanaan kebijakan gunting uang berlaku sejak tanggal 19 Maret 1950.–tanggal 16 April 1950 caranya yaitu dengan mengguling uang NICA, uang Hindia Belanda dan uang *de Javasche Bank* menjadi dua bagian dengan pecahan 5 Rupiah (*gulden*); (3) Kebijakan gunting uang menimbulkan reaksi yang beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan kebijakan gunting uang tersebut; (4) Dampak kebijakan gunting uang tahun 1950 bagi perekonomian Indonesia ialah peredaran uang mengalami penyusutan dari Rp 6 miliar menjadi Rp 1.6 miliar dan harga-harga lebih stabil.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *Dampak Krisis Ekonomi Di Indonesia Tahun 1946-1950 terhadap Lahirnya Kebijakan Gunting Uang Oleh Syafruddin Prawiranegara*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata S1 pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Dr. H. Rusdy A Siroj, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Heryati, S.Pd, M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Dra Nurhayati, M.Pd., Pembimbing I yang telah membantu, mengarahkan serta membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yuliarni S.Pd., M.Hum., Pembimbing II yang telah membantu, mengarahkan serta membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu, dorongan dan semangat kepada penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Ayahanda Judion dan Ibunda Sunarsih tercinta yang senantiasa memberikan dukungan do'a dan perhatian demi keberhasilanku.
8. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Pendidikan Sejarah, khususnya Angkatan 2016 yang tidak dapat tuliskan satu demi satu. Terima kasih untuk segala bantuannya.
9. Almamaterku.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, mungkin tidak terlepas dari sesuatu kekurangan dan kekeliruan, seperti pepatah mengatakan *tak ada gading yang tak retak*, demikian juga penulis tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengajaran bidang studi pendidikan sejarah dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya bagi semua, Aamiin ya Robbal Alamin.

Palembang, Agustus 2020

Desti Andriani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Masalah	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Definisi Istilah	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Pengertian Dampak, Krisis Ekonomi, Indonesia, Lahir, Kebijakan, dan Gunting Uang.....	23
1. Pengertian Dampak	23
2. Pengertian Krisis Ekonomi	24
3. Pengertian Indonesia	25
4. Pengertian Lahir	26
5. Pengertian Kebijakan	26
6. Pengertian Gunting Uang.....	27
B. Kondisi Kehidupan Sosial, Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Tahun 1946-1950.....	30
1. Kondisi Kehidupan Sosial, Masyarakat Indonesia Pada Tahun 1946-1950	30
2. Kondisi Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia Pada Tahun 1946-1950.....	32
a. Kericuhan Intern.....	36
b. Berunding dan Bertempur Melawan Belanda.....	37

3. Kondisi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Tahun 1946-1950.....	41
C. Biografi Syafruddin Prawiranegara.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian.....	52
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	56
1. Pendekatan Penelitian	56
a. Pendekatan Numismatik	56
b. Pendekatan Geografi.....	57
c. Pendekatan Sosial	58
d. Pendekatan Ekonomi	58
e. Pendekatan Politik	59
f. Pendekatan Historis	60
2. Jenis Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian	61
D. Kehadiran Penelitian	62
E. Sumber Data	62
1. Sumber Primer.....	62
2. Sumber Sekunder.....	63
F. Prosedur Pengumpulan Data	65
1. Studi Kepustakaan	66
2. Dokumentasi.....	67
G. Teknik Analisis Data	67
1. Kritik Sumber	68
a. Internal.....	68
b. Eksternal	69
2. Interpretasi	69
3. Historiografi	70
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	72
BAB IV PEMBAHASAN.....	76
A. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Gunting Oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Di Indonesia Tahun 1950	76
B. Proses Pelaksanaan Gunting Uang Yang Dilakukan Oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Di Indonesia Tahun 1950	91
C. Reaksi Rakyat Indonesia Dengan Adanya Kebijakan Gunting Uang Yang Dilakukan Oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Di Indonesia Tahun 1950	99
D. Dampak Kebijakan Gunting Uang Yang Dilakukan Oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Di Indonesia Tahun 1950 Bagi Perekonomian Indonesia	103

BAB V PENUTUP.....	105
1. Kesimpulan	109
2. Saran	111
DAFTAR RUJUKAN	112

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL	
3.1 Tahap-tahap Penelitian.....	73
4.1 Peredaran Uang Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) Sebelum dan Sesudah Kebijakan Gunting Uang.....	105
4.2 Peredaran Uang bulan Januari-September1950	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR	
1. Syafruddin Prawiranegara	118
2. Poster Kebijakan Gunting Uang	119
3. Uang de Javasche Bank yang Terkena Kebijakan Gunting Uang	120
4. Uang NICA yang Terkena Kebijakan Gunting Uang	121

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN	
1. Usulan Judul dan Pembimbing Skripsi	122
2. Surat Tugas Pembimbing	123
3. Surat Tugas Ujian Proposal Skripsi	124
4. Daftar Hadir Simulasi Proposal Penelitian.....	125
5. Pengangkatan Dosen Pembimbing	126
6. Surat Tugas Ujian Skripsi.....	127
7. Kartu Ujian Skripsi.....	128
8. Surat Pernyataan Penanggungjawaban Penulisan Skripsi.....	129
9. Laporan Kemajuan Bimbingan Skripsi	130
10. Riwayat Hidup.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya yaitu dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno yang didampingi Drs. M. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga tercapailah kemerdekaan Indonesia yang telah berabad-abad lamanya dinantikan oleh segenap bangsa Indonesia.

Proklamasi merupakan “suara rakyat bersama, menghancurkan belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan mengakibatkan kehidupan baru bagi rakyat dari berbagai bidang kehidupan termasuk bidang perekonomian” (Fatmah, 2018: 105). Namun, untuk mencapai kehidupan yang baru dengan kesejahteraan dan keadilan Indonesia tidak lah mudah, banyak halangan yang dilalui bangsa ini guna mencapainya.

Untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang baru merdeka supaya utuh dan berdaulat maka ditetapkan dengan ketetapan UUD 1945, bahwa "bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah *Kabinet Presidensiil*. *Kabinet Presidensiil* dibentuk oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 19 Agustus 1945” (Sudiyo, 2002: 110).

Sudiyo dalam bukunya yang berjudul *Arus Perjuangan Pemuda Dari Masa ke Masa*, menjelaskan dalam usaha membentuk pemerintahan Indonesia, maka pihak pemerintah mulai mengadakan pembentukan perangkat pemerintahan. Langkah

pertama adalah pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden M. Hatta mengeluarkan *Maklumat Pemerintahan No. X*, yang isinya antara lain menjelaskan:

Sebelum dibentuk lembaga MPR/DPR hasil pemilu, maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bertindak sebagai parlemen. Dengan demikian, terbentuklah *Kabinet Parlementer* dan yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan Indonesia adalah Perdana Menteri. Kebijakan tersebut merupakan suatu penyimpangan terhadap UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*. Dalam pasal tersebut seharusnya yang terbentuk adalah *Kabinet Presidensi* bukan *Kabinet Parlementer* dan yang harus bertanggung jawab jalannya pemerintahan adalah Presiden (Sudiyo, 2003: 156-157).

Pengeluaran maklumat tersebut merupakan bagian dari komitmen bangsa Indonesia yang harus segera mengfungsikan jalannya pemerintahan dengan harapan agar Republik Indonesia yang baru merdeka segera mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, pada akhirnya terbentuklah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri yang pertama ialah Sutan Syahrir.

Tidak hanya ingin mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, keputusan dari maklumat tersebut bukan tidak disadari oleh para pendiri negara waktu itu. Namun, karena keadaan yang sangat mendesak dan di sisi lain negara masih dalam mendapat rongrongan pihak penjajahan Belanda yang berusaha menjajah negara Indonesia kembali.

Keadaan yang mendesak akibat rongrongan Belanda ini diakibatkan Belanda yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka sangat sulit mengakui kenyataan tersebut, keinginan Belanda untuk menanamkan pengaruh *imperialisme* dan *kolonialisme* di Indonesia masih dilakukan berdasarkan *de facto* dan *de jure*. Sikap

Tjarda van Starckenborgh dalam perjanjian di Kalijati tahun 1942 dianggap memiliki nilai politik yang sangat tinggi, Belanda yang pandai menjalankan strategi licik, dalam sistem pemerintahan liberal Barat, terdapat prinsip sipil atas militer. Pemerintah Belanda mengklaim kepada dunia internasional khususnya kepada pihak Indonesia, bahwa Hindia Belanda tidak pernah menyerakan Indonesia kepada Jepang. Keadaan tersebut dikaitkan secara *de jure*, ialah “penyerahan Indonesia kepada Jepang melalui militer yang di wakikan melalui Jenderal Tjarda van Starckenborgh dalam perundingan di Kalijati, tanggal 8 Maret 1942” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 9).

Belanda menganggap penyerahan Indonesia kepada Jepang sebelum Indonesia merdeka tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sah menurut hukum (*de jure*) karena penyerahan yang dilakukan secara militer tidak sesuai secara *de jure* yaitu “berdasarkan hukum atau pengakuan berdasarkan atas pemerintahan” (Sugono, 2008: 332) .

Maka, dengan berdasarkan hukum tersebut, Belanda menganggap mengakuan yang dilakukan panglima militer Belanda pada tahun 1942 dianggap tidak sah dan berdasarkan pemerintah Belanda, Indonesia masih dianggap sebagai tanah jajahan milik Belanda. Oleh sebab itu, meskipun Indonesia telah merdeka Belanda tetap akan kembali menguasai wilayah Indonesia.

Bahkan tidak lama setelah itu, “pada tanggal 29 September 1945, tentara Sekutu yang diberi nama *Allied Forces Nederlands East Indies* (AFNEI) dengan dipimpin oleh Sir. Philip Christison mendarat di Jakarta. Kedatangan AFNEI bersama dengan tentara Belanda yaitu *Netherlands Indies Civiele Administration* (NICA) yang

dipimpin oleh van Mook” (Kusuma, 2014: 101). Adapun “kedatangan pasukan sekutu *Netherlands Indies Civiele Administration* (NICA) di Indonesia bertugas untuk menerima penyerahan Jepang” (Ricklefs, 2016: 323).

Pada awalnya, kehadiran AFNEI disambut baik oleh pihak Republik Indonesia, namun, ketika diketahui bahwa AFNEI membawa orang-orang NICA, sikap Republik Indonesia kemudian mencurigai maksud kedatangannya hingga menimbulkan ketegangan diantara NICA dan Republik Indonesia. “Maksud kedatangan NICA dibuktikan tindakan NICA yang mempersenjatai kembali bekas anggota tentara Hindia Belanda, yang disebut KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger*) yang baru dibebaskan dari tawanan perang” (Sudarjat, 2017: 45).

Pihak Indonesia menilai bahwa Sekutu melindungi kepentingan Belanda. Hal tersebut diketahui bahwa pasukan Inggris yang tergabung dalam AFNEI memiliki tugas tersendiri yaitu pemerintah Inggris telah terikat “perjanjian Urusan Pemerintah Sipil pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan Belanda tentang tugas Inggris untuk membantu Belanda memulihkan kembali kekuasaan Belanda di Hindia Belanda yang sejak tahun 17 Agustus 1945 telah diproklamasikan oleh bangsa Indonesia” (Darsono, dkk. 2016: 183). Oleh karena itu, “kedatangan Belanda ditentang oleh bangsa Indonesia, hingga menimbulkan bentrokan bersenjata, bahkan beberapa kota meledak menjadi pertempuran” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 187).

Usaha penjajahan kembali Belanda ke Indonesia menimbulkan kekacauan baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi yang berdampak pada bidang sosial masyarakat Indonesia. Akibat ikut campurnya Belanda di bidang politik dan

pemerintahan Indonesia, maka dengan terpaksa bangsa Indonesia menganut Demokrasi Liberal Parlementer.

Demokrasi Liberal berlaku bukan kehendak pemerintah Republik Indonesia, namun akibat dari perjuangan diplomasi yang menghasilkan persetujuan Konferensi Meja Bundar. Setelah “diratifikasinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar oleh Komite Nasional Indonesia (KNIP) yang bersidang pada tanggal 6-15 Desember 1949, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 301).

Demokrasi Liberal terbentuk akibat usaha Indonesia dalam melakukan usaha perdamaian dengan Belanda melalui diplomasi, namun karena van Mook tidak ingin berunding dengan presiden Ir. Sukarno dan wakil presiden Muhammad Hatta dan hanya mau berunding dengan Sutan Syahril maka terbentuklah Demokrasi Liberal.

Sistem Demokrasi Liberal yang berlaku akibat dari persetujuan Konferensi Meja Bundar memudahkan Belanda untuk memecah belah Republik dan ikut campur dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lebih lanjut Sukarni dalam bukunya yang berjudul *Sistem Politik Indonesia*, menjelaskan bahwa “sistem politik Demokrasi Liberal Parlementer menyebabkan bangsa Indonesia dalam perpecahan ideologi” (Sukarni, 1990: vii), bahkan Demokrasi Liberal berdampak pada kabinet yang silih berganti, sehingga program-program kabinet tidak dapat diselesaikan pada waktunya.

Sistem Politik Demokrasi Liberal Parlementer di Indonesia dianut pada tahun 1950-1959 yang mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Hal ini dikarenakan “Indonesia menganut sistem multipartai atau lebih dari satu partai yang mencoba untuk silih berganti dalam memperoleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Kondisi jatuh bangun partai tersebutlah yang kemudian mengakibatkan perpecahan politik Indonesia” (Setiawan, Permatasari dan Kumalasari, 2018: 366).

Dalam bidang ekonomi, sebagai negara yang baru merdeka pertempuran yang terjadi dengan Belanda di berbagai daerah menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian negara yang baru terbentuk. Selain melakukan upaya penyerangan melalui senjata, Belanda juga melakukan upaya penyerangan di bidang ekonomi, dengan cara Belanda melakukan *blockade* ekonomi Indonesia sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia.

Tujuan Belanda melakukan *blockade* ekonomi adalah “untuk menghancurkan perekonomian Republik Indonesia” (Fatmah, 2018: 108). Hasil yang utama diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial-ekonomi yang buruk, kegelisahan rakyat dan kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Barang-barang milik Republik diusahakan untuk dihancurkan dan dibumihanguskan. Selain itu, adanya inflansi yang tidak terkendalikan diharapkan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan sosial, sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik.

Hiperinflansi telah menimpa Republik Indonesia yang baru berusia beberapa bulan. Masalah tersebut terjadi karena beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Keadaan ini membuat ekonomi Republik Indonesia bertambah merosot, serta akibat dari Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Dalam bukunya *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (2008: 273) Poesponegoro dan Notosusanto menjelaskan bahwa: “sebenarnya di Republik

Indonesia terdapat tiga macam mata uang yang dinyatakan berlaku, yaitu mata uang *de Javasche* Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang Pendudukan Jepang”.

Selama masa tahun 1945-1949 perkembangan perekonomian Indonesia sangat mengkhawatirkan. Semua indikator makro ekonomi dengan tiada terkecualinya jelas menunjukkan “betapa dalamnya perekonomian Indonesia telah jatuh, seperti turunnya produksi secara hebat akibat hancurnya sebagian besar alat produksi, defisit dalam anggaran belanja pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintah Hindia Belanda dalam pengeluaran biaya besar-besaran di bidang militer yang mendorong *inflansi* di bidang ekonomi semakin deras” (To, 1991: 2).

Pada masa sistem Demokrasi Liberal, Indonesia berada dalam sistem ekonomi liberal. Beban hutang luar negeri sebesar Rp 1.500 juta dan hutang dalam negeri sejumlah Rp 2.800 juta. “Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan Konferensi Meja Bundar” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 334).

Hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar tentu sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Adapun isi perjanjian Konferensi Meja Bundar yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 sebagai berikut:

Menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia dan ke 15 negara bagian hasil bentukan Belanda, adanya kesepakatan antara Belanda dan Indonesia untuk membentuk Uni Indonesia Nederland, pembayaran kembali hutang lama pemerintahan Hindia Belanda oleh Indonesia, dan kesepakatan apabila RIS ingin mengubah mata uang atau membuat undang-undang mata uang baru, maka RIS harus bermusyawarah dulu dengan pemerintah Belanda. Untuk mengubah undang-undang *de Javasch* Bank atau membentuk bank sirkulasi baru bagi seluruh wilayah Republik Indonesia (Dwijandono dkk, 2005: 6).

Berdasarkan penjelasan isi perjanjian dari Konferensi Meja Bundar tersebut, Indonesia harus mendapat masalah baru dalam bidang ekonomi dan memperparah kondisi ekonomi Indonesia yang baru merdeka, masalah tersebut berkaitan dengan warisan hutang yang diberikan Belanda kepada Indonesia. Warisan Hutang dari perjanjian Konferensi Meja Bundar serta masalah inflasi harus segera diatasi oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Mata uang yang beredar di masyarakat yaitu uang *Netherlands Indies Civiele Administration* (NICA) atau uang merah, Oeang Republik Indonesia (ORI) di daerah Republik, uang pendudukan Jepang, segala macam uang itu mengalami inflansi yang tingkatnya tinggi sekali.

Semua masalah yang tertimbun itu merupakan tantangan bagi pemerintah Republik Indonesia Serikat. Usaha untuk mengatasi masalah tersebut, maka Syafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan tahu bahwa suatu tindakan yang drastis harus dilakukan. Pada tanggal 11 Maret 1950 dikeluarkanlah peraturan oleh Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret tahun 1950) untuk memperbaiki perkembangan neraca pembayaran dengan memakai sistem Sertifikasi Devisa. “Peraturan tentang *sertifikasi devisa* itu seminggu kemudian diikuti oleh tindakan dalam bidang moneter yang kemudian dikenal dengan sebutan *gunting Syafruddin* atau *gunting uang*” (Rosidi, 2011: 250).

Dalam buku *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, To menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Keuangan RIS. NO. P.U. 2 merupakan peraturan dari pelaksanaan Undang-Undang Darurat, ditetapkan tanggal 18 Maret dan diundangkan tanggal 19 Maret 1950 (Lembaran Negara No.2), yang dalam pasal 1 menentukan sebagai berikut :

Menteri Keuangan diberi kuasa selama terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1950 untuk mengambil segala tindakan untuk mengadakan pinjaman bagi Negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewajibkan turut serta dalam pinjaman dalam sedemikian itu, lagi pula untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang, jika perlu dengan menyimpang dari undang-undang yang berlaku kecuali Konstitusi Sementara (To, 1991: 210).

Sehubungan dengan fakta-fakta di atas, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan Gunting Uang oleh Syafruddin Prawiranegara*, Alasan penulis mengangkat judul ini karena penulis ingin membuka wawasan dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana latar belakang kebijakan gunting uang, proses pelaksanaan kebijakan gunting uang serta dampak yang terjadi setelah kebijakan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara bagi perekonomian bangsa Indonesia.

Penelitian tentang perjuangan Syafruddin Prawiranegara dalam memajukan ekonomi di Indonesia sebelumnya pernah ditulis oleh beberapa peneliti. Pertama oleh Yuni Budiawati Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Tassyariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), pada tahun 2014 dengan judul *Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia : Study Komparatif Pemikiran Muhammad Hatta dan Syafruddin Prawiranegara*. Dari hasil tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan perekonomian Indonesia pada pemikiran Muhammad Hatta dan Syafruddin Prawiranegara meliputi konsep ekonomi pembangunan menurut konsep dari konvensional dan Islam. Secara umum, akan

dijabarkan isu-isu pokok ekonomi pembangunan menurut kedua konsep tersebut serta mendeskripsikan perkembangan ekonomi Indonesia dari setiap periode dan juga bagaimana para tokoh penting serta pemikirannya.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Muhammad Mansur dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2017 dalam jurnalnya *Nun, Vol.3, NO.1*, yang berjudul *Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Konstekstual Indonesia Tentang Riba)*. Dari hasil tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa riba lebih dekat dengan segala keuntungan transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian, tetapi terdapat satu pihak yang menyalahgunakan sehingga mengambil keuntungan melampaui batas dari pihak lawannya. Namun, menurut Syafruddin tidak semua riba harus bertentangan dengan ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang dilakukan dalam prakteknya.

Dari tulisan terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan kedua penelitian terdahulu dengan tulisan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai keterlibatan Syafruddin Prawiranegara dalam perekonomian dan keuangan Indonesia dan lokasi penelitiannya sama-sama di wilayah Indonesia, sedangkan perbedaannya terdapat pada tahun penelitian dan fokus penelitian. Penelitian Yuni Budiawati dilaksanakan pada tahun 2014, Muhammad Mansyur penelitiannya pada tahun 2017 sedangkan penulis sendiri melakukan penelitian pada tahun 2020. Fokus penelitian Yuni Budiawati konsep pembangunan ekonomi Indonesia, Muhammad Mansyur fokus penelitiannya yaitu pandangan Syafruddin Prawiranegara terhadap bunga bank, sedangkan penelitian

penulis sendiri terfokus pada dampak krisis ekonomi di Indonesia tahun 1946-1950 terhadap lahirnya kebijakan gunting uang oleh Syafruddin Prawiranegara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini ke dalam tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan Gunting Uang oleh Syafruddin Prawiranegara*, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S1) di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mencapai titik fokus dalam penelitian ini, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penulisan penelitian ini dibedakan menjadi dua aspek yaitu :

- 1) Aspek *Spatial* (ruang atau wilayah) penelitian ini dilakukan di wilayah Indonesia, karena Indonesia merupakan tempat dilaksanakan kebijakan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara.
- 2) Aspek *temporal* (waktu), terhadap aspek temporal penulis membatasi kajian waktu pada periode tahun 1946 sampai 1950, karena pada tahun 1946 Indonesia pertama kali menganut sistem Politik Demokrasi Parlementer Liberal dan sistem Ekonomi Liberal.

Di sistem demokrasi ini, Indonesia yang baru merdeka masih menerima tantangan yang berat akibat kedatangan Belanda dan usaha

Belanda untuk ikut campur dalam pembentukan pemerintahan Republik Indonesia agar pemerintah Republik Indonesia tidak dapat membentuk pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menyebabkan kabinet silih berganti dan program-program kabinet tidak dapat diselesaikan pada waktunya. Dalam sistem ekonomi liberal, usaha Belanda untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia yaitu dengan *blockade ekonomi*, yaitu untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia.

Pada tahun 1949, melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar Indonesia harus menanggung beban hutang yaitu pembayaran hutang-hutang Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1950 ketika Syafruddin Prawiranegara duduk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta (Republik Indonesia Serikat), Syafruddin dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah *hiperinflansi* akibat banyaknya jumlah uang yang beredar mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan *gunting uang* pada tanggal 19 Maret-16 April 1950. Kebijakan gunting uang tersebut dikenal juga dengan *gunting Syafruddin* karena dilakukan pada saat Syafruddin Prawiranegara menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1950.

C. Rumusan Masalah

Dari judul penelitian penulis tentang *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan Gunting Uang oleh Syafruddin Prawiranegara*, ini membawa dampak positif untuk mengetahui sejarah yang belum

terungkap. Hal ini sangat memotivasi penulis untuk dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan gunting uang oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950?
2. Bagaimana proses pelaksanaan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950?
3. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia dengan adanya kebijakan Gunting Uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950?
4. Apa dampak kebijakan gunting uang yang dilakukan oleh menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950 bagi perekonomian Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan GuntingUang oleh Syafruddin Prawiranegara*, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya munculnya kebijakan gunting uang oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950.

3. Untuk mengetahui reaksi rakyat Indonesia dengan adanya kebijakan Gunting Uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950.
4. Untuk mengetahui dampak kebijakan gunting uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara di Indonesia tahun 1950 bagi perekonomian Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoristik

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan GuntingUang oleh Syafruddin Prawiranegara*, agar dapat dijadikan landasan untuk bertindak di masa kini, sehingga memperoleh masa depan yang lebih baik.

2. Secara Praktis

Kegunaan kajian atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan antara lain kepada :

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pemahaman yang baik tentang penulisan karya ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis khususnya mengenai *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan GuntingUang oleh Syafruddin Prawiranegara*.

- b. Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa, serta dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, terutama dalam mengkaji dan memperdalam sejarah perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan.
- c. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khasanah kesejarahan dan dapat dijadikan sebagai referensi pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, tentang *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan GuntingUang oleh Syafruddin Prawiranegara*.
- d. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini menjadikan masyarakat lebih mengetahui dan mengerti tentang sejarah *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan GuntingUang oleh Syafruddin Prawiranegara*.

F. Definisi Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang *Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1946-1950 Terhadap Lahirnya Kebijakan GuntingUang oleh Syafruddin Prawiranegara*. maka penulis dapat menguraikan beberapa defenisi istilah yang digunakan untuk menerangkan berbagai istilah-istilah yang tidak dimengerti. Definisi istilah tersebut diperoleh dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang diterbitkan oleh *Prima Media* karangan Andini Nirmala dan Aditya Pratama tahun 2003 sebagai berikut :

- Anggaran* : Perkiraan; perhitungan.
- Allied Forces*
- Netherlands East*
- Indies (AFNEI)* : Pasukan Sekutu yang dibentuk dari komando bawahan SEAC (South East Asia Command) yang menjalankan tugas di Indonesia (Hindia Belanda) setelah menyerahnya Jepang.
- Algemene Middelbare*
- School (AMS)* : Pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda dengan masa pendidikan tiga tahun.
- Bank* : Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- Bank Komersial* : (Bank umum) lembaga keuangan yang dimiliki swasta, berorientasi mencari laba, melakukan pemindahan dana jika diinstruksikan dengan cek, memberi pinjaman dan melakukan investasi lainnya.
- Bersikap Skeptis* : Kurang percaya, ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya).

- Blokade* : Pengepungan (penutupan) suatu daerah, kawasan, tempat atau negara, sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas.
- Bijeenkomst voor Federaal Overleg* : Sebuah komite atau badan yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945-1949.
- Cek* : Perintah tertulis pemegang rekening kepada bank dan sebagainya yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang: *pembelian barang itu dibayar dengan selembar kertas yang bernilai tertentu kemudian ditukar di bank.*
- Deposito* : Uang yang disimpan dalam rekening.
- De Facto* : Berdasarkan kenyataan/fakta
- De Jure* : Berdasarkan menurut hukum.
- Devisa* : Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri.
- Demokrasi Liberal* : Sistem politik yang menganut kebebasan individu.
- Delegasi* : Orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara dan sebagainya) dalam suatu perundingan (musyawarah dsb).
- Ekonomi* : Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).

- Ekonomi Liberal* : Sistem ekonomi dimana sebagian besar keputusan perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu bukan lembaga atau organisasi bahkan pemerintah.
- Europeesche Lagere School* : Sekolah Dasar pada zaman kolonial Belanda yang didirikan di Indonesia diperuntukan untuk anak-anak Belanda.
- Ekspor* : Pengiriman barang dagangan ke luar negeri.
- Federal* : Berpemerintahan sipil yang beberapa negara bagian membentuk kesatuan dan setiap negara bagian memiliki kebebasan dalam mengurus persoalan di dalam negerinya.
- Giro* : Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan.
- Gulden* : Mata uang negara Belanda
- Gunting Uang* : Memotong uang kertas milik mata uang *merah* atau uang *Netherlands Indies Civiele Administration* (NICA), Uang Hinda Belanda dan de Javasche Bank yang bernilai *f* 5 (rupiah 5) ke atas menjadi duabagian dengan nilai setengah dari mata uang tersebut, dimana uang bagian kiri sebagai alat pembayaran dan uang bagian kanan sebagai obligasi yang ditukarkan ke bank-bank yang ditetapkan pemerintah.

- Hiperinflansi* : Kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang dengan cepat dan menurunnya daya beli.
- Indonesia* : Nama negara dikepulauan Asia Tenggara yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia.
- Inflansi* : Kemerostan nilai uang (kertas) sehingga banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.
- Islam* : Agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw yang berpedoman pada kitab suci Al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.
- Impor* : Pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.
- Kabinet Presidensiil* : Sistem pemerintahan dng pelaksanaan tugas eksekutif dipimpin dan dipertanggungjawabkan oleh presiden.
- Kabinet Parlementer* : Kabinet yang menteri-nya diajukan oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen serta perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.
- Kebijakan* : Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan.
- Kontraversional* : Bersifat menimbulkan perdebatan; persengketaan.
- Konsolidasi* : Perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya).
- Legitimasi* : Pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang).

- Masyarakat* : Sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi(tertutup atau semi terbuka)
- Moneter* : Mengenai, berhubungan dengan uang atau keuangan.
- Meer Uitgebreid Lager*
- Onderwijs (MULO)* : Sekolah Menengah Pertama pada zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
- Negara Federasi* : Gabungan beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat yang mengurus hal-hal mengenai kepentingan nasional seluruhnya (seperti keuangan, urusan luar negeri, dan pertahanan).
- Neraca* : Catatan perbandingan untung rugi, utang-piutang, pemasukan dan pengeluaran, dan sebagainya.
- Netherlands Indies*
- Civiele Administration*
- (NICA) : Organisasi semi militer yang dibentuk pada 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi pasukan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia) se usai Perang Dunia II (1939 - 1945).
- Obligasi* : Surat Pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjual belikan.

<i>Oeang Republik Indonesia (ORI)</i>	: <u>Mata uang</u> pertama yang dimiliki <u>Republik Indonesia</u> setelah merdeka.
<i>Parlemen</i>	: Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara.
<i>Peranan</i>	: Bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan
<i>Perang</i>	: Permusuhan antara dua Negara (bangsa, agama, suku)
<i>Republik</i>	: Bentuk pemerintahan yang berdaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden.
<i>Republiken</i>	: Penganut ketatanegaraan yang berbentuk republik.
<i>Rechtshoogeschool te Batavia (RHS)</i>	: Perguruan tinggi hukum pertama dan lembaga pendidikan tinggi kedua di Hindia Belanda (Indonesia) pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
<i>Politik</i>	: Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
<i>Sosial</i>	: Berkenaan dengan masyarakat
<i>Sejarah</i>	: Orang yang paham dalam ilmu sejarah.
<i>Sistem</i>	: Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sistem Demokrasi

- Parlementer* : Sistem Politik Indonesia pada tahun 1950-1959 dengan menganut sistem multipartai atau lebih dari satu partai yang mencoba untuk silih berganti dalam memperoleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
- Uang* : Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
- Uang Kartal* : Alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.
- Uang Giral* : Alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan sewaktu-waktu seperti cek, giro, atau telegraphic transfer.
- Uang NICA* : Mata uang yang diterbitkan oleh NICA/Belanda setelah Indonesia merdeka, uang NICA pada umumnya berwarna merah yang menampilkan gambar ratu Wilhelmina.
- Uang de Javasche Bank* : Mata uang Pemerintah Belanda yang diterbitkan sebelum masuknya Jepang di Indonesia, pada umumnya uang wayang dan bertuliskan de Javasche Bank.
- Yen* : Mata uang negara Jepang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta : Pustaka Amani Jakarta
- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Arruz Media Group
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos
- Abdurahman. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Anggoro, M. Toho, dkk. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Arif, M. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widja
- Arif, Muhammad. 1991. *Geografi Regional Indonesia*. Medan: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit tidak dituliskan
- Barents. 1983. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Mizan
- Banindro, Baskoro Suryo. 2017. *Sejarah Uang Kertas “Oeang Republik Indonesia (ORI)” Masa Revolusi 1945-1950*. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta
- Boediono, dkk. 2011. *Membaca Syafruddin Prawiranegara (Dari Ekonomi sampai PRRI)*. Jakarta : Panitia Peringatan Satu Abad Mr. Syafruddin Prawiranegara (1911-2011) Abadi Publishing dan Printing
- Budiawati, Yuni. 2014. *Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia : Studi Komparatif Pemikiran Bung Hatta dan Syafruddin Prawiranegara*. Jakarta : Skripsi, tidak di publikasikan. <http://www.repository.unjkt.ac.id>. Diakses 05 Oktober 2019
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok : Rajagrafindo

Pustaka

- Darmadi, Hamid, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Darmadi, Hamid, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Darsono, dkk. 2016. *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Depdiknas, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Detik Finance. 2013. *Melihat Kembali Uang 'Gunting Syafruddin' yang Melegenda*.<https://finance.detik.com>. Diakses 12 Agustus 2020
- Djiwandono, J. Soedradjad, dkk. 2005. *Sejarah Bank Indonesia Periode I : 1945-1959*. Jakarta : Bank Indonesia
- Dinar, Muhammad dan Muhammad Hasan. 2018. *Pengantar Ekonomi : Teori dan Aplikasi*. Makasar : CV. Nur Lina
- Fatmah, 2018. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Fatmah, 2018. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Fitria, Putri. 2014. *Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia*. Bandung : Nuansa Cendikia
- Goldfeld, M. Stephen dan Lester V. Chandler. 1988. *Ekonomi Uang dan Bank*. Penerjemahan Danny Hutabarat. Jakarta : Erlangga
- Hamid, Abd Rahman dan Muhammad, Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Hugiono & Poerwantana. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ibnu, Suhadi. 2003. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Iwan. 2015. *Koleksi Uang yang Pernah berlaku Indonesia*.<https://uniquecollection.wordpress.com>. Diakses 12 Agustus 2020
- Iskandar, Muhammad. 2014. *Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi. Jurnal Sejarah Oeang Republik (Online) Vol 6, No.1*(<https://books.google.co.id/books>. Diakses 21 Juli 2020)

- Irwanto, Dedi & Alian Sair. 2014. *Metodologi Dan Historiografi Sejarah Cara Cepat Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Eja_Publisher
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendidikan Ilmu Sosial Dalam Metode Sejarah*. Jakarta: Garamedia Pustaka
- Kriyantono, Rachman. 2006. *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Kusuma, Erwien. 2014. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta : Buku Kompas
- Lasmia. 2012. Sejarah Uang Republik Indonesia Banten (URIDAB) (1945-1949). *Jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung (Online)* Vol 4 No. 3, (<http://neliti.com> diakses 13 Juli 2020)
- Marhinjanto, Bambang. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang.
- Mahawira, Pranadipa. 2013. *Cinta Pahlawan Nasional Indonesia Mengenal dan Meneladani*. Jakarta : Wahyu Media
- Mansur, Muhammad. 2017. Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Konstektual Indonesia tentang Riba). *Jurnal. Nun (Online)* Vol.3 No.1.(<http://media.neliti.com>. diakses 18 September 2019)
- Masduqi, Zaenal. 2012. Penggunaan Dinar Dirham dan Fulus : Upaya Menggali Tradisi Yang Hilang. *Holistik* Vol 13 Nomor 02. <http://syekhnurjati.ac.id>. Diakses 01 September 2020
- Muhammad, Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Nailufar, Nibras Nada. 2020. *Gunting Syafruddin: Latar Belakang, Tujuan, dan Dampaknya*. <https://www.kompas.com>. Diakses 12 Agustus 2020
- Nazir, Muhamad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nensi. 2003. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Nirmala, Andini dan Aditya Pratama. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya:Prima Media
- Nurul, Zulaiha. 2005. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Nirmala, Andini dan Aditya Pratama. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya:Prima Media
- Prasetya, Johan. 2014. *Pahlawan-Pahlawan Bangsa yang Terlupakan*. Yogyakarta : Saufa
- Prawiranegara, Syafruddin. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2*. Jakarta : Pustaka Jaya
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2008 : *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Nasional Modern 1200-2008*. Jakarta : Serambi
- Ricklefs, M.C. 2016. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rama, Tri. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian : Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rosidi, Ajib. 2011. *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta : Pustaka Jaya
- Sari, Rofiana Fika. 2013. *Pengertian Uang Menurut Para Ahli*. <http://www.idpengetahuan.com>. Diakses 24 September 2019
- Sari, Septa Wulan. 2016. Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *Jurnal. AN-NISBAH (Online)* Vol 03 NO. 01 ([http:// media.neliti.com](http://media.neliti.com). diakses 21 Juli 2020)
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta : Citra Lamtoro Gung Persada

- Setiawan, John, Wahyu Ida Permatasari dan Dyah Kumalasari. 2018. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. *Jurnal HISTORIA (Online)* Vol 06 No. 02 (<http://ojs.fkip.ummetro.ac.id> . diakses 31 Agustus 2020)
- Soedarjdo, Nichlany. 1991. *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Serangan Umum 1 Maret dan PERUM PERURI
- Solikin dan Suseno. 2002. *UANG Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
- Sudarjat, Edi. 2017. *Syafruddin Prawiranegara Biografi Pemikiran Islam Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sudiyo. 2003. *Arus Perjuangan Kemerdekaan Dari Masa Ke Masa*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Syah, Muhibbin. 2008. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Syafei, Inu Kencana dkk. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sukarni. 1990. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Tjondronegoro, Purnaman. 1980. *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*. Jakarta:Nugraha
- To, Oey Beng. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
- Tim Penulis LP3ES. 1995. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Qodratillah, Meity Taqdir, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional

- Qodratillah, Meity Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan kebudayaan
- Waridah, Ernawati. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bmedia
- Wie, Thee Kian. 2005. *Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Terjemahan Koesalah Soebagyo Toer. Jakarta: Buku Kompas
- Widada, R.H dan Icuk Prayogi. 2010. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Tim Bentang Pustaka
- Wikipedia. 2020. *Syafruddin Prawiranegara*. <https://id.wikipedia.org.jpg>. Diakses 12 Agustus 2020
- Wulandari, Cesilia Dea Afifah. 2014. *Peran Politik Syafruddin Prawiranegara Tahun 1945—1961*. Makalah. <http://eprints.uns.ac.id>
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia